



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI  
DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM DAN DPD  
DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS  
PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2019  
SERTA PERUBAHAN PROLEGNAS RUU TAHUN 2015-2019**

**TANGGAL 29 OKTOBER 2018**

---

Tahun Sidang : 2018- 2019  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : 15 (lima belas)  
Jenis rapat : Rapat Kerja  
Hari/tanggal : Senin, 29 Oktober 2018.  
Pukul : 11.20 WIB s/d 12.20 WIB.  
Tempat : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.  
Acara : Pegambilan Keputusan atas hasil Penyusunan  
: Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan  
: Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019.  
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.  
Sekretaris : Widiharto, SH., MH.  
Hadir : - 45 orang, izin 5 orang dari 74 orang Anggota.  
: - Menteri Hukum dan Ham beserta jajarannya;  
: - Pimpinan PPUU DPD beserta jajarannya.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Ham dan DPD dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 serta Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 11.20 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Ketua Panja Penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 untuk menyampaikan laporannya.

## II. POKOK PEMBAHASAN

1. Laporan Ketua Panja penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2015-2019, sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, telah dibicarakan secara intensif dalam Rapat Panja Badan Legislasi.
  - b. dalam penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, Badan Legislasi DPR RI telah menerima usulan RUU sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) RUU yang berasal dari Komisi, Fraksi, Anggota DPR RI, Pemerintah, DPD dan Masyarakat.
  - c. Terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) RUU tersebut, terdapat 43 (empat puluh tiga) RUU yang berasal dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan 2 (dua) RUU yang memiliki kesamaan judul dan materi muatan sehingga setelah dilakukan kajian secara mendalam, jumlah RUU baru yang diusulkan tersisa sebanyak 32 (tiga puluh dua) RUU.
  - d. Pendapat/pandangan yang mengemuka dalam Rapat Panja terkait dengan :
    - Evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018;
    - RUU yang diusulkan oleh DPR, Pemerintah dan DPD;
    - Rasionalitas penetapan jumlah RUU Prioritas Tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, jumlah RUU yang diusulkan serta berbagai saran dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat.
  - e. Berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya Panja memutuskan hal-hal sebagai berikut :
    - Menetapkan Penambahan 4 (empat) RUU usulan baru ke dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, yaitu :
      - a) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DPR RI);
      - b) RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan (DPR RI);
      - c) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (DPR); dan
      - d) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Pemerintah).
    - Menetapkan penggantian 1 (satu) RUU dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, yaitu RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber, untuk menggantikan RUU tentang Persandian.
    - Menetapkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 sebanyak 12 (dua belas) RUU usulan baru dan 43 (empat puluh tiga) RUU berasal dari Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018.

- f. 12 (dua belas) RUU usulan baru berasal dari 7 (tujuh) RUU usul DPR, 4 (empat) RUU usul Pemerintah, dan 1 (satu) RUU usul DPD.
  - g. Demikian secara garis besar hasil penyusunan Prolegnas Perubahan Tahun 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019.
2. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2015-2019, sebagai berikut :
- Berdasarkan pendapat Fraksi-fraksi dapat diketahui bahwa 10 (sepuluh) Fraksi yaitu F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-Nasdem, dan F-Hanura dapat menerima hasil kerja Panja dan menyetujui Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2015-2019 untuk dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk selanjutnya dapat ditetapkan melalui keputusan DPR RI.
3. Pandangan/tanggapan Pemerintah atas penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 sebagai berikut :
- a. Pemerintah mengapresiasi dan menerima hasil penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019 dan perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019.
  - b. Terkait dengan usulan dari Fraksi Partai Nasdem mengenai RUU tentang Otonomi Khusus Papua, saat ini dalam tahap penyusunan Naskah Akademik yang melibatkan juga beberapa daerah lain.
  - c. Pembahasan atas penyusunan RUU tentang Otonomi Khusus Papua tersebut perlu dilakukan dengan kehati-hatian, mengingat RUU tersebut terkait juga dengan daerah lain.
  - d. Pemerintah mengharapkan capaian Prolegnas pada tahun 2019 akan lebih baik dari capaian tahun 2018.
4. Pandangan/tanggapan PPUU DPD RI atas penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019 sebagai berikut :
- a. DPD dapat menerima hasil penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Prolegnas Perubahan RUU Tahun 2015-2019.
  - b. DPD mengharapkan DPR dan Pemerintah dapat segera menyelesaikan pembahasan Tingkat I atas RUU-RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018, khususnya RUU yang berasal dari DPD RI.
  - c. DPD RI siap membantu DPR dan Pemerintah dalam proses pembahasan RUU tersebut jika diperlukan.

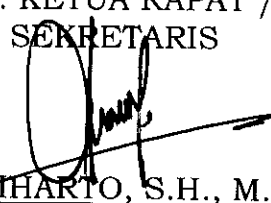
### III. KESIMPULAN

Rapat Kerja Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka Pembahasan Penyusunan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, tanggal 29 Oktober 2018 menyetujui untuk menyepakati;

1. Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 sebanyak 12 (dua belas) RUU baru dan 43 (empat puluh tiga) RUU dari Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 dengan perincian 12 (dua belas) Rancangan Undang-Undang usulan baru terdiri dari 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang dari DPR, 4 (empat) Rancangan Undang-Undang dari Pemerintah, dan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang dari DPD. Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 sebagaimana Lampiran I.
2. Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 yaitu dengan menambahkan 4 (empat) Rancangan Undang-Undang baru dan 1 (satu) Rancangan Undang-Undang penggantian. Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 sebagaimana Lampiran II..

Rapat ditutup pukul 12.20 WIB

Jakarta, 29 Oktober 2018  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

  
WIDIHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001

### LAMPIRAN I:

Keputusan Rapat Kerja Badan Legislasi  
DPR RI dengan Menteri Hukum dan  
HAM RI dan Panitia Perancang  
Undang-Undang DPD RI.

Tanggal 29 Oktober 2018

### DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2019

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH
1.	RUU tentang Pertanahan.	DPR/KOMISI II
2.	RUU tentang Jabatan Hakim.	DPR/KOMISI III
3.	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.	DPR/KOMISI IV
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	DPR/KOMISI VI
5.	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR/KOMISI VIII
6.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR/ANGGOTA
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR/ANGGOTA
8.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR/ANGGOTA
9.	RUU tentang Pertembakauan.	DPR/ANGGOTA
10.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional.	DPR/ANGGOTA
11.	RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-	DPR/KOMISI X

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH
	simpan Karya Cetak dan Karya Rekam).	
12.	RUU tentang Kebidanan.	DPR/KOMISI IX
13.	RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).	DPR/ANGGOTA
14.	RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman).	DPR/KOMISI IV
15.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat).	DPR/ANGGOTA
16.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	DPR/KOMISI VII
17.	RUU tentang Sumber Daya Air.	DPR/KOMISI V
18.	RUU tentang Konsultan Pajak.	DPR/ANGGOTA
19.	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara. (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis : RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN).	DPR/KOMISI VI
20.	RUU tentang Pendidikan Kedokteran (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis : RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran).	DPR/ANGGOTA
21.	RUU tentang Pekerja Sosial (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis : RUU	DPR/KOMISI VIII

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH
	tentang Praktik Pekerjaan Sosial).	
22.	RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis : RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren).	DPR/ANGGOTA
23.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	DPR/KOMISI VII
24.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR/KOMISI I
25.	RUU tentang Perkelapasawitan.	DPR/ANGGOTA
26.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	DPR/ANGGOTA
27.	RUU tentang Penyadapan.	DPR/ANGGOTA
28.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.	DPR/KOMISI IX
29.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	DPR/KOMISI V
30.	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.	DPR/BADAN LEGISLASI
31.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	DPR/BADAN LEGISLASI
32.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPR/ANGGOTA
33.	RUU tentang Permusikan.	DPR/ANGGOTA
34.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR/ANGGOTA
35.	RUU tentang Perubahan Kedua Atas	DPR/ANGGOTA

No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.	
36.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	PEMERINTAH
37.	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	PEMERINTAH
38.	RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis : RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).	PEMERINTAH
39.	RUU tentang Mahkamah Konstitusi (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis : RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).	PEMERINTAH
40.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	PEMERINTAH
41.	RUU tentang Bea Meterai.	PEMERINTAH
42.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).	PEMERINTAH
43.	RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah).	PEMERINTAH
44.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang	PEMERINTAH



No.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH
	Pemasyarakatan.	
45.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal.	PEMERINTAH
46.	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia).	PEMERINTAH
47.	RUU tentang Desain Industri. (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri).	PEMERINTAH
48.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara.	PEMERINTAH
49.	RUU tentang Hukum Acara Perdata.	PEMERINTAH
50.	RUU tentang Data Pribadi (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis : RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi).	PEMERINTAH
51.	RUU tentang Wabah (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis : RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular).	PEMERINTAH
52.	RUU tentang Ekonomi Kreatif.	DPD
53.	RUU tentang Wawasan Nusantara.	DPD
54.	RUU tentang Daerah Kepulauan (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis: RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan).	DPD
55.	RUU tentang Bahasa Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019, tertulis : RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah).	DPD

**DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA**

1.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.
2.	RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
5.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

**Jakarta, 29 Oktober 2018**

**LAMPIRAN II:**

Keputusan Rapat Kerja Badan Legislasi  
DPR RI dengan Menteri Hukum dan  
HAM RI dan Panitia Perancang  
Undang-Undang DPD RI.

Tanggal 29 Oktober 2018

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG TAHUN 2015-2019**

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA &amp; RUU DISLAPKAN OLEH</b>
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	DPR/PEMERINTAH
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.	DPR/PEMERINTAH
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).	DPR/PEMERINTAH
4	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR
5	RUU tentang Rahasia Negara.	DPR/PEMERINTAH
6	RUU tentang Keamanan Nasional.	DPR/PEMERINTAH
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	DPR/PEMERINTAH
8	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia.	DPR/PEMERINTAH
9	RUU tentang Konvergensi Telematika.	DPR/PEMERINTAH/DPD

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH
10	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara.	PEMERINTAH
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.	PEMERINTAH
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.	DPR
13	RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi.	PEMERINTAH
14	RUU tentang Wawasan Nusantara.	DPD
15	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.	PEMERINTAH
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.	PEMERINTAH
17	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.	PEMERINTAH
18	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.	DPR
19	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	DPR
20	RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.	DPR/PEMERINTAH

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH
21	RUU tentang Pertanahan.	DPR
22	RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD.	DPR/PEMERINTAH/DPD
23	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.	DPR/PEMERINTAH/DPD
24	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.	DPR/DPD
25	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.	DPR/PEMERINTAH
26	RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.	DPD
27	RUU tentang Provinsi Bali.	DPD
28	RUU tentang Etika Penyelenggara Negara/ RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan.	DPR
29	RUU tentang Partisipasi Masyarakat.	DPD
30	RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan.	DPD
31	RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria.	DPR
32	RUU tentang Perkumpulan.	DPR/PEMERINTAH/DPD
33	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.	PEMERINTAH

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH
34	RUU tentang Hukum Acara Pidana.	DPR
35	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.	DPR/PEMERINTAH
36	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.	PEMERINTAH/DPD
37	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	DPR/PEMERINTAH
38	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	PEMERINTAH/DPD
39	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.	DPR/PEMERINTAH
40	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.	DPR
41	RUU tentang Hukum Acara Perdata.	PEMERINTAH
42	RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat.	DPR/DPD
43	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.	DPR/PEMERINTAH
44	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana.	PEMERINTAH
45	RUU tentang Mahkamah Agung.	DPR
46	RUU tentang Merek.	PEMERINTAH

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA &amp; RUU DISIAPKAN OLEH</b>
47	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.	PEMERINTAH
48	RUU tentang Ekstradisi (mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi).	PEMERINTAH
49	RUU tentang Paten.	PEMERINTAH
50	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.	PEMERINTAH
51	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.	DPR
52	RUU tentang Jabatan Hakim.	DPR
53	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer.	PEMERINTAH
54	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.	PEMERINTAH
55	RUU tentang Pemindahan Narapidana antar Negara.	PEMERINTAH
56	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.	PEMERINTAH
57	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.	PEMERINTAH
58	RUU tentang Balai Harta Peninggalan.	PEMERINTAH
59	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.	DPR

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH
60	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.	PEMERINTAH
61	RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan ( <i>Contempt of Court</i> ).	DPR
62	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.	DPR
63	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	DPR
64	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik.	DPR/PEMERINTAH/DPD
65	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya.	DPR/PEMERINTAH
66	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.	DPR/DPD
67	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.	DPR/PEMERINTAH
68	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	DPR/PEMERINTAH
69	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.	DPR
70	RUU tentang Zona Tambahan Indonesia.	PEMERINTAH



<b>NO.</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA &amp; RUU DISIAPKAN OLEH</b>
71	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.	DPR/DPD
72	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	DPR/PEMERINTAH
73	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.	DPR/DPD
74	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.	DPR
75	RUU tentang Kedaulatan Pangan.	DPR
76	RUU tentang Jalan.	DPR/DPD
77	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.	DPR
78	RUU tentang Jasa Konstruksi.	DPR
79	RUU tentang Arsitek.	DPR
80	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional.	DPR
81	RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan.	DPR
82	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.	DPR
83	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.	DPR/PEMERINTAH

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH
84	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.	DPR/DPD
85	RUU tentang Perkoperasian.	DPR/PEMERINTAH/DPD
86	RUU tentang Pertembakauan.	DPR
87	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	DPR
88	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.	DPR
89	RUU tentang Bahan Kimia.	PEMERINTAH
90	RUU tentang Metrologi Legal.	PEMERINTAH
91	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah.	DPD
92	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.	PEMERINTAH
93	RUU tentang Ekonomi Kreatif.	DPD
94	RUU tentang Kewirausahaan Nasional.	DPR
95	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	DPR/PEMERINTAH
96	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	DPR/PEMERINTAH

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH
97	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan.	DPR/PEMERINTAH
98	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.	DPR
99	RUU tentang Geologi.	DPR/DPD
100	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi.	DPR
101	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.	DPR
102	RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender.	DPR/PEMERINTAH/DPD
103	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	DPR
104	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR
105	RUU tentang Penyandang Disabilitas.	DPR
106	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.	DPR/DPD
107	RUU tentang Kepalangmerahan.	DPR
108	RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial.	DPR

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH
109	RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan.	DPR
110	RUU tentang Ketahanan Keluarga.	DPR
111	RUU tentang Perlindungan Umat Beragama.	DPR/PEMERINTAH
112	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	PEMERINTAH
113	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.	DPR
114	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.	DPR
115	RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.	DPR/DPD
116	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.	DPR
117	RUU tentang Kebidanan.	DPR/DPD
118	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan.	PEMERINTAH
119	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.	DPR
120	RUU tentang Praktik Kefarmasian.	DPR

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH
121	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.	DPR
122	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.	PEMERINTAH
123	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	PEMERINTAH
124	RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.	DPR/PEMERINTAH
125	RUU tentang Sistem Pengupahan.	DPR/PEMERINTAH
126	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.	DPR/PEMERINTAH/DPD
127	RUU tentang Kebudayaan.	DPR
128	RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah.	DPD
129	RUU tentang Sistem Perbukuan.	DPR
130	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.	DPR/DPD
131	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.	DPR

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH
132	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.	DPR/PEMERINTAH/DPD
133	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.	DPR/PEMERINTAH
134	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.	DPR/PEMERINTAH
135	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.	DPR/PEMERINTAH
136	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah.	DPR/PEMERINTAH
137	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.	PEMERINTAH
138	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.	DPR/DPD
139	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	DPR
140	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal.	PEMERINTAH
141	RUU tentang Pajak Penghasilan.	PEMERINTAH/DPD
142	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	PEMERINTAH/DPD
143	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara.	PEMERINTAH/DPD

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA &amp; RUU DISIAPKAN OLEH</b>
144	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.	DPR
145	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah.	PEMERINTAH
146	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.	PEMERINTAH
147	RUU tentang Lelang.	PEMERINTAH
148	RUU tentang Penjaminan.	DPR
149	RUU tentang Penjaminan Polis.	PEMERINTAH
150	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.	PEMERINTAH
151	RUU tentang Penilai.	PEMERINTAH
152	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa.	DPD
153	RUU tentang Perekonomian Nasional.	DPR/DPD
154	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.	PEMERINTAH
155	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia.	PEMERINTAH
156	RUU tentang Bea Materai.	PEMERINTAH
157	RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan.	PEMERINTAH

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH
158	RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.	PEMERINTAH
159	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.	DPR
160	RUU tentang Tabungan Haji.	DPR
161	RUU tentang Pengampunan pajak.	PEMERINTAH
162	RUU tentang Perkelapasawitan.	DPR
163	RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU tentang Pertekstilan.	DPR
164	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.	PEMERINTAH
165	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.	PEMERINTAH
166	RUU tentang Keamanan Laut.	DPR
167	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR
168	RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.	DPR
169	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR
170	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR
171	RUU tentang Konsultan Pajak.	DPR



NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA & RUU DISIAPKAN OLEH
172	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.	DPR
173	RUU tentang Ketenaganukliran.	PEMERINTAH
174	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	PEMERINTAH
175	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.	DPD
176	RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.	DPD
177	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	DPR
178	RUU tentang Sanitasi.	DPR
179	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	DPR
180	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPR
181	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	DPR
182	RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.	DPR

<b>NO.</b>	<b>JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG</b>	<b>NA &amp; RUU DISIAPKAN OLEH</b>
183	RUU tentang Permukiman.	DPR
184	RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat.	DPD
185	RUU tentang Penyadapan.	DPR
186	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR
187	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR
188	RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.	DPR
189	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.	PEMERINTAH

<b>DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA</b>	
1.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional.
2.	RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
5.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

**Jakarta, 29 Oktober 2018**